

## Sosialisasi E-Government Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

<sup>1</sup>Hendika Dwinanda Wicaksana, <sup>2</sup>Mukhamad Busro Asmuni, <sup>3</sup>Marina Rospitasari,  
<sup>4</sup>Chomariyana Kartika Hesti, <sup>5</sup>Dyah Ayu Kusuma Dewandaru

<sup>1,2,4</sup>Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta Selatan  
<sup>3,5</sup>Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta Selatan

E-mail: [1hendikawicaksana@upnvj.ac.id](mailto:1hendikawicaksana@upnvj.ac.id), [2mukhamadbusroa@upnvj.ac.id](mailto:2mukhamadbusroa@upnvj.ac.id),  
[3marinarospitasari@upnvj.ac.id](mailto:3marinarospitasari@upnvj.ac.id), [4chomariyanakh@upnvj.ac.id](mailto:4chomariyanakh@upnvj.ac.id),  
[5dyahayukd@upnvj.ac.id](mailto:5dyahayukd@upnvj.ac.id)

### ABSTRAK

Inovasi dalam bidang teknologi informasi memberikan dampak signifikan terhadap struktur tata kelola pemerintahan, termasuk pada pemerintahan desa. Penggunaan e-Government dijadikan strategi kunci untuk memperbaiki efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Namun, pelaksanaannya sering kali terkendala oleh rendahnya literasi digital, sumber daya perangkat desa serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penggunaan teknologi informasi. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mensosialisasikan konsep dan manfaat e-Government berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, pelatihan teknis, diskusi partisipatif, dan pendampingan langsung kepada perangkat desa dan warga. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap layanan digital pemerintahan, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola platform digital, serta terbentuknya tim relawan digital desa sebagai motor penggerak literasi teknologi. Kegiatan ini juga mendorong komitmen pemerintah desa untuk menyusun rencana pengembangan sistem informasi desa secara berkelanjutan.

**Kata kunci : Sosialisasi, e-Government, Pemberdayaan Masyarakat**

### ABSTRACT

*The development of information technology has brought changes to the governance system, including at the village level. The implementation of e-Government is a crucial strategy for improving the efficiency, transparency, and accountability of public services. However, its implementation is often hampered by low digital literacy, limited village apparatus resources, and a lack of community participation in supporting the use of information technology. This community service activity aims to disseminate the concept and benefits of e-Government based on community empowerment in Dadirejo Village, Tirto District, Pekalongan Regency. The methods used included outreach, technical training, participatory discussions, and direct mentoring for village officials and residents. The results of the activity showed an increase in community understanding of digital government services, an increase in the capacity of village officials in managing digital platforms, and the formation of a village digital volunteer team as a driving force for technological literacy. This activity also encouraged the village government's commitment to developing a sustainable village information system development plan.*

**Keyword: Socialization, e-Government, Community Empowerment**

## 1. PENDAHULUAN

Transformasi teknologi digital memberikan dampak signifikan pada banyak aspek kehidupan manusia, termasuk dalam cara masyarakat berkomunikasi dengan instansi pemerintahan. Di zaman digital saat ini, teknologi informasi berperan lebih dari sekadar perangkat bantu, melainkan menjadi tulang punggung dalam pengembangan layanan publik yang cepat, efisien, dan transparan (Subekti et al., 2024).

Pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, memanfaatkan perkembangan teknologi ini untuk memperbaiki kinerja birokrasi dan menjawab tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih akuntabel (Asmuddin, 2025).

Menurut (Syam et al., 2023) Untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang terus berubah dan kompleks, birokrasi modern harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital dan tidak lagi bergantung pada sistem lama yang rumit dan penuh prosedur yang berbelit-belit.

Di sinilah hadir Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang kerap dikenal sebagai e-Government, sebagai jawaban untuk membangun pengelolaan pemerintahan yang lebih baik, terbuka, dan peka terhadap kebutuhan rakyat (Pratiwi et al., 2025). Penggunaan layanan e-Government digunakan sebagai administrasi kependudukan online, perpajakan digital, perizinan terpadu, dan platform pengaduan masyarakat telah tersedia di banyak wilayah (Jafar, 2024).

Meski demikian, penerapan e-Government di tingkat desa masih dihadapkan pada sejumlah kendala, khususnya berkaitan dengan rendahnya kemampuan literasi digital warga, keterbatasan sarana dan

prasarana, serta minimnya pemahaman perangkat desa terhadap teknologi yang digunakan (Shabihah et al., 2025). Hal ini juga terlihat di Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, di mana penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik masih belum optimal. Padahal, desa memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berbasis komunitas yang partisipatif dan berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat menjadi pendekatan strategis untuk mengatasi tantangan tersebut. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses sosialisasi dan pelatihan, pelaksanaan e-Government bukan semata-mata kewajiban pemerintah desa, melainkan juga mencerminkan kesadaran serta kebutuhan yang tumbuh di kalangan masyarakat. (Barkah et al., 2025). Menurut (Hasyiyati et al., 2025) Sosialisasi yang berbasis pemberdayaan akan mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital, serta mengembangkan ekosistem pemerintahan desa yang lebih transparan dan responsif terhadap dinamika teknologi.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang untuk melaksanakan sosialisasi e-Government berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Dadirejo. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital warga desa, memperkuat kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan sistem informasi desa, serta menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses transformasi digital pemerintahan desa (Wibowo et al., 2025).

Berdasarkan analisis situasi pada saat tim melaksanakan kunjungan ke lokasi tempat pengabdian masyarakat, tim menggali informasi melalui perangkat desa

Dadirejo Kecamatan Tirto. Adapun rumusan masalah yang dapat kami uraikan yaitu: a) Pelayanan publik yang belum optimal sampai ke tingkat desa. 2) Kurangnya pemahaman aparatur desa dan masyarakat mengenai sistem pelayanan publik yang ada di desa Dadirejo secara online. Sehingga berdasarkan uraian diatas, maka tim pengusul dan mitra menyepakati permasalahan yang akan diselesaikan yaitu berupa kurangnya pemahaman aparatur desa mengenai e-government.

Oleh karena itu, kami membuat sebuah terobosan dengan melakukan pendampingan kepada aparatur desa mengenai sistem pelayanan yang ada di desa. Hal itu guna mempermudah proses pelayanan publik bagi masyarakat di desanya.

Dari permasalahan tersebut, perlu adanya sebuah peningkatan kapasitas di bidang teknologi informasi yang ada, yaitu, dengan cara melakukan sosialisasi serta pelatihan E-Government dari Dosen Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta kepada aparatur desa Dadirejo Kecamatan Tirto. Solusi yang diberikan yaitu dengan memberikan E-Government berupa website desa beserta pendampingan berupa sosialisasi atau pelatihan kepada perangkat desa untuk menunjang pelayanan publik di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

## 2. PERMASALAHAN MITRA

Pengabdian masyarakat ini diselenggarakan dengan maksud untuk memberikan sosialisasi mengenai e-Government, kegunaan, dan cara pemanfaatannya dalam pelayanan publik desa, terutama di Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Selain itu, tujuan tambahan lainnya adalah:

- a. Membantu masyarakat yang belum

terbiasa atau memiliki keterbatasan akses dan pemahaman teknologi agar tidak tertinggal dalam proses digitalisasi layanan pemerintahan.

- b. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan publik menjadi lebih cepat, efisien dan transparan
- c. Mendukung prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Pendekatan solusi yang dapat diterapkan meliputi::

- a. Menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi tentang cara mengakses dan menggunakan layanan e-Government
- b. Membuat panduan (manual/tutorial) penggunaan layanan digital pemerintah dalam bahasa yang mudah dipahami.
- c. Membangun satu platform terpadu yang mengintegrasikan berbagai layanan publik lintas instansi.
- d. Melakukan evaluasi kegiatan untuk dapat mengukur tingkat pemahaman masyarakat dan perangkat desa dalam menggunakan e-Government sebagai bagian dari kemudahan pelayanan publik.

## 3. METODOLOGI

Dalam pengabdian masyarakat tidak hanya memberikan materi tetapi juga memberikan dampingan praktik secara langsung bagaimana penggunaan e-Government dalam pelayanan publik.

### Metode Pendekatan

Sosialisasi penggunaan e-Government untuk pelayanan publik dilakukan pada hari senin tanggal 17 september 2025, sebagai berikut:

- a. Memberikan pengertian dan konsep e-Government serta manfaat dan keunggulan layanan



digital tersebut

- b. Pembekalan/pendampingan untuk dapat praktik secara langsung bagaimana menggunakan layanan e-Governemnt dalam pelayanan publik.

Demi tercapainya tujuan kegiatan, tim pengabdian melakukan proses evaluasi dengan mengidentifikasi kriteria dan menetapkan indikator keberhasilan sebagai berikut:

**Tabel 1 Penetapan Indikator Keberhasilan Pengabdian**

Kegiatan	Kriteria	Indikator Keberhasilan
Sosialisasi	Menedukasi masyarakat dan perangkat desa sekaligus meningkatkan kesadaran mereka terhadap urgensi penerapan e-Government	1. Peningkatan Partisipasi. 2. Perubahan Sikap dan Kesadaran masyarakat dan perangkat desa dalam mendukung digitalisasi pelayanan publik.
Praktirk	Pendampingan secara langsung terhadap kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perangkat desa dalam hal digitalisasi layanan publik.	1. Jumlah layanan desa yang mulai beralih ke sistem digital/e-Government. 2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja perangkat desa setelah pelatihan e-Government.

### Rencana Pengabdian Masyarakat

- a. Proses awal dimulai dengan memperoleh izin dari Kepala Desa setempat atau mitra untuk melaksanakan program pengabdian masyarakat.
  - 1) Melakukan identifikasi lokasi dan mitra
  - 2) Mempersiapkan dokumen pendukung
  - 3) Mengajukan permohonan izin ke Kepala Desa
  - 4) Koordinasi dan sinkronisasi jadwal
  - 5) Penandatanganan surat kerja sama.

- b. Tahap akhir melakukan pelaporan hasil pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat pada mitra:
  - 1) Penyusunan Laporan Kegiatan
  - 2) Publikasi Laporan pelaksanaan pengabdian masyarakat
  - 3) Tindak lanjut & Rekomendasi
  - 4) Pelaporan Internal Kampus

### 4. Hasil dan Pembahasan.

Penerapan sistem informasi digital di lingkungan pemerintahan desa bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan administrasi publik, termasuk dalam merumuskan kebijakan dan menyampaikan layanan secara efektif pemberian pelayanan sebagai responsi atas perubahan lingkungan strategis yang menuntut adanya administrasi publik yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (Ashar et al., 2025).

Menurut (Banjarnahor et al., 2022) Pengelolaan informasi yang sebelumnya bersifat seragam dan terpusat kini bergeser menuju sistem informasi yang lebih terbuka, partisipatif, dan desentralistik yang lebih heterogen dan demokratis. Tata kelola pemerintahan yang sebelumnya bersifat tertutup dan kaku kini telah bertransformasi menjadi lebih transparan, fleksibel, dan melibatkan partisipasi publik.

#### 1. Tahap Persiapan

Pelaksanaan PKM diawali dengan fase perencanaan, yang mencakup pembentukan kelompok kerja, penetapan topik utama, serta pemilihan lokasi kegiatan. Setelah struktur tim terbentuk, dilakukan koordinasi internal untuk merumuskan rencana operasional serta mendistribusikan tanggung jawab kepada setiap anggota. Selanjutnya penentuan tema dan lokasi ditetapkan berdasarkan identifikasi masalah di

daerah sasaran (Alim et al., 2022).

Tim PKM melaksanakan survei pada tanggal 10 September 2025 di Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Setelah berdiskusi dengan Pemerintah Desa Dadirejo maka ditetapkan tema kegiatan tentang sosialisasi e-Government berbasis pemberdayaan masyarakat dengan jadwal pelaksanaan kegiatan pada Sabtu 17 September 2025

Selanjutnya, tim menyiapkan administrasi dan perlengkapan kegiatan, termasuk perizinan lokasi, pemilihan narasumber, serta koordinasi dengan berbagai pihak.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Melalui kegiatan sosialisasi e-Government, perangkat desa dan masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai urgensi transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sosialisasi ini tidak hanya mengenalkan konsep dasar e-Government, tetapi juga menjelaskan manfaat konkret dari penerapan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel (AW, 2024).

Dalam konteks pelayanan publik, digitalisasi memungkinkan proses administrasi menjadi lebih cepat, mudah diakses, serta minim kesalahan. Bagi perangkat desa, hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja birokrasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat (Briyadi et al., 2025).

Sementara itu, bagi masyarakat, sosialisasi ini membuka ruang partisipasi yang lebih luas serta memberikan akses yang lebih setara terhadap informasi dan layanan pemerintahan. Maka dari itu, edukasi

mengenai e-Government berperan sebagai pijakan utama dalam pengembangan pemerintahan desa yang progresif, menyesuaikan diri, serta cepat merespons dinamika kebutuhan masyarakat digital (Mannayong & Faisal, 2024).

Meskipun memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik, implementasi e-Government di pemerintah desa sering kali menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks. Hambatan tersebut tidak hanya bersifat teknis, seperti keterbatasan infrastruktur jaringan internet dan perangkat keras yang memadai, tetapi juga terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital yang masih rendah (Djabbari et al., 2024).

Selain itu, resistensi budaya dari sebagian perangkat desa maupun masyarakat yang masih terbiasa dengan sistem manual dan tradisional turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan e-Government. Faktor-faktor ini secara signifikan menghambat proses adaptasi dan integrasi teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan desa.



Gambar 1 di atas, Para peserta kegiatan memperoleh materi terkait pemanfaatan sistem e-Government

dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam kegiatan tersebut, peserta mempelajari sejumlah aspek penting, termasuk prosedur penambahan data penduduk. Mereka dibekali dengan panduan teknis mengenai mekanisme input dan pembaruan data kependudukan secara digital, guna memastikan akurasi pencatatan serta optimalisasi pengelolaan data kependudukan di tingkat desa.

Selanjutnya, peserta memperoleh pemahaman mengenai pemantauan data statistik kependudukan, yang mencakup pelatihan tentang cara mengakses serta memantau data kependudukan secara daring dan waktu nyata (real-time). Kemampuan ini berperan penting dalam mendukung proses perencanaan pembangunan serta peningkatan efektivitas pelayanan publik di tingkat desa. Selain itu, peserta juga mempelajari sistem pengelolaan administrasi surat-menyurat berbasis digital, yang mencakup prosedur pengajuan berbagai jenis dokumen administratif, seperti surat keterangan dan dokumen legal lainnya, melalui sistem informasi yang terintegrasi secara elektronik.

Sebagai tindak lanjut untuk memperdalam pemahaman peserta, pada akhir presentasi peserta diberi ruang untuk bertanya dan mengeksplorasi bagian-bagian materi yang belum sepenuhnya dipahami. Selain itu, peserta juga diberi ruang untuk membahas berbagai kendala atau masalah yang selama ini mereka hadapi. Setelah itu, tim pengabdian memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan serta menawarkan solusi konkret terhadap permasalahan yang dialami peserta.

### 3. Tahap Evaluasi

Penilaian terhadap kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui

beberapa metode, yaitu penilaian terhadap proses serta penilaian terhadap capaian pelatihan. Penilaian proses pelaksanaan pengabdian dapat diukur dari tingkat komitmen dan ketekunan peserta, yakni aparatur Desa Dadirejo, selama pelaksanaan sosialisasi tentang pentingnya sistem informasi desa.

Selanjutnya, penilaian hasil pelatihan dilaksanakan berdasarkan hasil posttest yang telah dilakukan.

Setelah sosialisasi kepada aparat desa terkait sistem informasi desa selesai, tim pengabdian kembali melaksanakan post-test dan pre-test. Pertanyaan tentang internet meningkat dari nilai 80 pada pre-test ke 92 pada post-test, menandakan bahwa mereka sudah memiliki dasar pengetahuan yang memadai sejak awal.

Berdasarkan hasil evaluasi, terjadi peningkatan yang signifikan pada aspek pengetahuan peserta mengenai Website Desa. Skor rata-rata pada pre-test sebesar 52 meningkat menjadi 73 pada post-test. Pada indikator pemahaman terhadap konten Website Desa, juga tercatat adanya peningkatan dari skor 55 menjadi 74. Sementara itu, pengetahuan terkait manfaat Website Desa mengalami lonjakan yang cukup tinggi, yakni dari 50 pada pre-test menjadi 83 pada post-test.

Secara kumulatif, rata-rata nilai pre-test peserta adalah 60 dan meningkat menjadi 80 pada post-test, yang menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan keseluruhan sebesar 20 poin setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pelatihan yang diberikan memiliki dampak positif terhadap peningkatan pemahaman peserta terhadap sistem informasi berbasis digital di lingkungan pemerintahan desa. Data rinci mengenai hasil evaluasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.



Tabel 2 Penilaian Pre Test dan Post Test

No	Materi Sosialisasi	Evaluasi	
		Pre Test	Post Test
1	Pengetahuan ttg Internet	93	98
2	Pengetahuan ttg Website Desa	56	81
3	Pengetahuan ttg Isi Web Desa	50	75
4	Manfaat ttg Web Desa	53	81
	%Rata-rata	62	82

#### 4. Kendala yang dihadapi

Selama proses pelaksanaan kegiatan sosialisasi, hambatan utama yang diidentifikasi adalah ketidakstabilan jaringan internet di wilayah Desa Dadirejo. Kondisi ini menyebabkan terjadinya gangguan dalam proses introduksi dan demonstrasi sistem pelayanan administrasi desa berbasis web. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengimplementasikan sejumlah strategi mitigatif, antara lain dengan menyediakan perangkat modem portabel yang menggunakan layanan dari penyedia jaringan alternatif, serta menyusun materi pendukung dalam format offline berupa dokumen PDF yang dapat diakses secara luring tanpa memerlukan koneksi internet.

#### 5. Kesimpulan

Pelaksanaan sosialisasi mengenai Sistem Informasi Desa kepada Aparatur Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan telah terlaksana sesuai dengan jadwal dan rencana yang telah ditetapkan. Dari kegiatan tersebut, dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain bahwa sebelum sosialisasi ini dilaksanakan, para aparatur Desa Dadirejo belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai penggunaan e-Government

untuk membantu pelayanan publik.

Setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan pihak mitra yaitu aparat Desa Dadirejo telah mengetahui dan memahami tentang Sistem Informasi Desa dalam kegiatan pelayanan publik. Dari hasil penilaian, tercatat peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap sistem informasi desa dan kegunaannya, yakni dari 62,5% naik menjadi 82,9%.

Melalui implementasi e-Government, aparat pemerintah memiliki kemudahan dalam menyelenggarakan layanan publik yang berkualitas. Masyarakat pun memperoleh kemudahan dalam mengakses informasi serta mendapatkan layanan secara cepat dan efisien.

Oleh karena itu, disarankan agar kegiatan sosialisasi dan pelatihan terkait pemanfaatan e-Government dalam penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan secara berkelanjutan, guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap sistem tersebut, yang pada akhirnya dapat mendukung peningkatan mutu layanan publik di seluruh wilayah desa.

#### 6. Ucapan Terima Kasih

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dilaksanakan berkat dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, khususnya Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi, atas segala bantuan dan kontribusinya dalam menyelesaikan kegiatan ini.

## Daftar Pustaka

- Alim, W. S., Manullang, S. O., Aziz, F., Romadhon, S., Marganingsih, A., Ratnaningtyas, E. M., Sulandjari, K., Wulandari, R., & Efendi, Y. (2022). Pemberdayaan masyarakat: Konsep dan strategi. *Samarinda: PT. Gaptek Media Pustaka*.
- Ashar, A., Irwan, I., & Dema, H. (2025). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan E-Government di Desa Sipodeceng. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 421–428.
- Asmuddin, A. (2025). Pengaruh Transformasi Digital terhadap Partisipasi Masyarakat dalam E-Government. *NUSANTARA: Jurnal Sosial Dan Sains*, 1(1), 14–21.
- AW, M. J. (2024). Dampak E-Government dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(4), 204–226.
- Banjarnahor, A. R., Sinaga, J. B. M., Handiman, U. T., Samosir, K., Purba, B., Siagian, V., Gandasari, D., Army, W. L., Harizahayu, H., & Nugroho, A. (2022). *Transformasi Digital dan Perilaku Organisasi*. Yayasan Kita Menulis.
- Barkah, N. K., Setiawan, A., & Munawaroh, S. (2025). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DESA MELALUI PROGRAM BIG FARMER DI DESA KERTAWANGI KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BANDUNG BARAT. *Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 2(2).
- Briyadi, P., Mustofah, A., & Pramudiana, I. D. (2025). Smart Desa, Layanan Cerdas: Inovasi Digitalisasi Pelayanan Administrasi di Desa Sabrang, Klaten. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2(4), 143–163.
- Djabbari, M. H., Irfan, B., Nugroho, T. C., Amiruddin, I., & Yanto, E. (2024). Implementasi E-Government dalam Pelayanan Publik Berbasis Website di Desa Tondowolio Kabupaten Kolaka. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 158–170.
- Hasyyati, Z., Jannah, M., & Ramazalena, R. (2025). Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Literasi Digital melalui Pelatihan Komputer. *Jurnal Pengabdian Ekonomi Dan Sosial (JPES)*, 4(1), 25–36.
- Mannayong, J., & Faisal, M. (2024). Transformasi digital dan partisipasi masyarakat: mewujudkan keterlibatan publik yang lebih aktif. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(1), 53–75.
- Pratiwi, S. F., Zalukhu, L. A., Tesa, A. R., Aisyah, I., & Saputra, B. (2025). Implementasi Digital pada Tata Kelola Administrasi: Upaya Meningkatkan Mutu Pelayanan di Era Birokrasi Modern. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11).
- Shabihah, S. A., Ryanindityo, M., & Nurkumalawati, I. (2025). PERAN E-GOVERNANCE SEBAGAI INSTRUMEN PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DI INDONESIA. *Journal of Administration and International Development*, 5(1), 45–54.
- Subekti, R., Ohyver, D. A., Judijanto, L., Satwika, I. K. S., Umar, N., Hayati, N., Handika, I. P. S., Joosten, J., Migunani, M., & Boari, Y. (2024). *Transformasi Digital: Teori & implementasi Menuju Era Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Syam, R., Ras, A., & Habibie, A. Y. (2023). Kesiapan Dan Kendala Transformasi Birokrasi Digital Di Pedesaan. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 9(1), 1–18.
- Wibowo, A. M. M., Nur, S. A., Puspitasari, S. A., Agustina, I. S., Maharani, C. E., & Purwanto, M. Z. (2025). Peningkatan Literasi Digital dan Digitalisasi Data Desa di



Kabupaten Magelang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien*, 4(2), 46–58.